

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

**Oleh :
Yasya Dwi Anriva
Pembimbing : Zirman dan Al Azhar A.**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : yasyadwi@yahoo.com*

*The Effect of Human Resource, Information Technology, and Internal
Control on Quality of Reporting*

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of human resource, information technology, and internal control to the quality of reporting on Indragiri Hulu Regency in 2017. The methods used in this research was multiple linear regression. The sampling methods used was purposive sampling which counted 32 Regional Work Unit with 96 total respondents. Data collected by distributing questionnaires to 96 respondents working in 32 Regional Work Unit in Indragiri Hulu Regency, but only 81 questionnaires were returned and can be processed. The results of the hypothesis test showed that human resource has significant effect on the quality of reporting with 0.018, 0.000, and 0.000 significance. The influence of human resource has significant effect on the quality of reporting is 63.6% while the remaining 36.4% is influenced by other variables.

Keywords : human resource, information technology, internal control, quality of reporting.

PENDAHULUAN

Masih banyaknya penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dalam pelaksanaan audit keuangan pemerintah membuat fenomena pelaporan keuangan menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pasal 33 pada UU No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah daerah belum

menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD (Hullah, dkk., 2012:9-10).

Dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 maka pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Laporan pertanggung jawaban pemerintah dapat dicapai

jika didukung oleh sistem akuntansi yang baik sehingga menghasilkan informasi keuangan yang handal. Kualitas informasi yang dihasilkan sangat diperlukan untuk kepercayaan dari publik dan sangat ditentukan dari orang-orang yang membuat laporan tersebut. Kualitas informasi pada sektor pemerintahan merupakan hasil dari laporan keuangan. Kualitas informasi dikatakan baik jika informasi yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan dari standar akuntansi pemerintahan (Jamiyla, 2010:3).

Dalam upaya meningkatkan penerimaan dan pengelolaan keuangan pemerintah tentu saja diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dikarenakan jika organisasi mempunyai sumber daya manusia yang bernilai dalam artian mempunyai kapabilitas yang dapat diandalkan, mempunyai kemampuan yang langka sehingga sulit untuk ditiru dan ditambah dengan dukungan struktur organisasi yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan organisasi (Fuad, 2004:471).

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja yang tepat, untuk mengisi berbagai kedudukan, jabatan, masa kerja persyaratan jabatan kepegawaian, dan kepangkatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu. Semakin cepat waktu

penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Hullah, dkk., 2012:10).

Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan pemerintah daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif (Darise, 2007:247).

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Di sinilah peran aparatur sebagai sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang baik untuk mengelola keuangan daerah. Salah satu cara yang dapat ditempuh aparatur dalam peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga tujuan pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dicapai (Wansyah, dkk., 2012:45).

Perkembangan kemajuan teknologi informasi berjalan sangat pesat seiring dengan tuntutan kebutuhan para pemakainya. Dalam era globalisasi harus memanfaatkan kemajuan tersebut sebaik mungkin

agar tidak kehilangan peluang dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dalam berbagai sektor. Suatu kebijakan strategis sangat memerlukan tersedianya informasi yang akurat dan terpadu dari berbagai aspek. Fungsi utama dari suatu informasi adalah untuk mendukung perencanaan strategis, pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, serta untuk pengawasan dan pengendalian. Pada masa sekarang ini, untuk menyajikan informasi yang akurat dan terpadu sangat tepat jika memanfaatkan teknologi informasi (Nazier, 2004:504-505).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Daerah dan SKPD diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan multi-processing. Pengimplementasian teknologi informasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, jika teknologi informasi tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara optimal, maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal (Wansyah, dkk., 2012:45).

Pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab keuangan

merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, masih banyak ditemukan beberapa kejanggalan. Dalam laporan keuangan tersebut masih adanya penyajian data-data yang tidak sesuai, selain itu juga banyak penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Terbukti, menurut hasil pemeriksaan BPK, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus mengalami penurunan cenderung semakin buruk. Hal ini disebabkan oleh pengawasan intern pemerintah daerah masih lemah dan kekurangan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang kompeten (Lismawati, 2012:4).

Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan merupakan bagian yang penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mengingat, pengawasan suatu kegiatan dimaksudkan untuk meyakinkan dan menjamin agar kegiatan dan tugas-tugas dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan, ketentuan, dan standar sehingga memudahkan tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. (Muhammad, 2004:502).

Dalam penelitian Hidayat (2011:1-2) dikatakan bahwa banyaknya kecurangan yang timbul akibat semakin kompleksnya transaksi maupun operasional

organisasi. Dengan demikian, mengharuskan organisasi tersebut untuk meningkatkan pengendalian internal di setiap operasional untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kualitas pengendalian internal yang dimiliki maka akan semakin rendah pula tingkat penyimpangan yang dapat terjadi.

Berdasarkan hubungan antar variabel, fenomena yang ada, dan terdapatnya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.”

TELAAH PUSTAKA

Kualitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat empat karakteristik laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat karakteristik tersebut adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil

evaluasinya di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Andal adalah Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan maksudnya adalah Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan jika suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan jika entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pada pengguna. Oleh karena itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud

Hubungan antara Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemda

Kapasitas SDM merupakan kemampuan baik dalam tingkat individu, organisasi atau

kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Sukirman, dkk., 2013:4). Untuk menilai kinerja dan kualitas SDM dalam melaksanakan suatu fungsi termasuk akuntansi, dapat dilihat dari tanggung jawab dan kompetensinya. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, SDM tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010: 6-7).

Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi yang sesuai merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi, termasuk organisasi di pemerintahan daerah. Dengan adanya kompetensi pegawai yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, dalam hal ini adalah membuat laporan keuangan, akan menjadikan laporan keuangan memiliki kualitas yang baik. Hal ini dikarenakan pegawai tersebut telah menguasai bagaimana cara menyajikan laporan keuangan dengan benar. Kompetensi pegawai ini dapat diperoleh dari bangku

pendidikan, pelatihan pegawai, dan lain-lain.

Penelitian Sukmaningrum (2012) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh. Kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas.

H₁: Kapasitas Sumber daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Keuangan Pemda

Informasi akuntansi diperlukan untuk melakukan perencanaan keuangan, menghitung biaya program, dan penganggaran. Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Proses penggaran melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga informasi ini sangat diperlukan agar publik dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah (Mardiasmo, 2004:165).

Teknologi Informasi yang sangat canggih dewasa ini memberikan banyak kemudahan bagi keperluan pengorganisasian data. Peng-organisasian data yang baik

akan sangat memudahkan penyusunan laporan keuangan, menjamin tingkat akurasi data yang tinggi, dan akses data yang cepat. Di samping itu, dengan penggunaan teknologi informasi yang memadai, pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan yang relevan akan dapat mengakses dengan mudah dan transparan.

Teknologi informasi memiliki peran yang besar dalam memudahkan berbagai kegiatan manusia. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi pada organisasi pemerintahan daerah. Organisasi pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi pada penyajian laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat dilihat pada kegiatan pencatatan transaksi keuangan pemerintah yang menggunakan komputer dengan jaringan internet atau LAN yang telah terpasang di masing-masing guna memudahkan komunikasi dengan pegawai lain atau departemen lain. Penggunaan software yang sesuai dengan kegiatan penyajian laporan keuangan juga merupakan pemanfaatan teknologi yang berguna di lingkungan pemerintahan. Hal ini dikarenakan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi baik itu sistem komputerisasi, jaringan internet, ataupun penggunaan software akan memudahkan pegawai dalam mengelola laporan keuangan serta memudahkan untuk pengecekan oleh pimpinan atau auditor, sehingga dapat diperoleh laporan keuangan yang berkualitas.

Supriyanti (2006) melakukan penelitian mengenai peranan teknologi informasi dalam audit sistem informasi komputer akuntansi

dimana dalam penelitiannya ingin mengetahui seberapa penting peranan teknologi informasi dalam duni akuntansi, hasil penelitiannya menunjukkan teknologi informasi sangat berperan dalam proses audit sistem informasi yang berbasis komputer sehingga kualitas audit yang dihasilkan juga ikut berpengaruh.

H₂: Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hubungan antara Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemda

Laporan keuangan dalam sektor publik memegang peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik maka memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah dengan menjalankan pengendalian akuntansi dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima umum (Mahmudi, 2007 dalam Darwanis dan Mahyani, 2009:134).

Pengendalian intern dalam suatu lembaga menjadi hal utama dan sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasikan dan memberikan

batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya.

Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tidak kompeten. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Noviyanti, 2004; Mulyadi, 2005 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010:7-8).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 Ayat (3) menyebutkan bahwa tujuan SPIP salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya keandalan pelaporan keuangan. Tujuan dari sistem pengendalian internal di pemerintahan daerah adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data-data akuntansi. Dengan adanya sistem akuntansi yang diterapkan di pemerintah daerah, diharapkan risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan maupun kesalahan perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan kerugian. Dengan demikian, diharapkan para pegawai akuntansi keuangan di pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan adanya pengendalian internal yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida Aryani (2013), Darwanis & Dewi Dwi Mahyani (2009), Kesuma, dkk., (2014), Wahsyah,

dkk., (2012), dan Sukirman, dkk., (2013) mengenai pengaruh dari pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan menghasilkan kesimpulan bahwa pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian Yadyana I Ketut (2008) menunjukkan bahwa kemampuan manajemen berupa perencanaan dan pengorganisasian berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi.

H₃: Sistem pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD dikabupaten Indragiri Hulu Riau. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah: a. Para pegawai yang melaksanakan fungsi keuangan pada SKPD. b. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat Eselon II, III dan IV. c. Responden ditetapkan pada Kepala Dinas masing-masing SKPD, Kepala Bagian/staf keuangan masing-masing SKPD, dan Kepala/staf sub bagian keuangan masing-masing SKPD, sehingga masing-masing SKPD memiliki 3 responden.

Berdasarkan metode dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 32 SKPD dengan total 96 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,

yang diperoleh secara langsung melalui penyampaian kuesioner. Untuk mendapatkan data yang menunjang penelitian, peneliti juga akan melakukan metode wawancara.

Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan kemudian dianalisis. Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang telah ada sebelumnya, maka terbentuklah model yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = *Tax Avoidance*

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X_1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia

X_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X_3 = Sistem Pengendalian Intern

e = Variabel Pengganggu

Penelitian ini telah melalui serangkaian uji normalitas dan uji asumsi klasik, yaitu autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji tersebut, dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah terdistribusi dengan normal dan bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kualitas Pelaporan Keuangan

Kualitas pelaporan keuangan merupakan ukuran ukuran normatif

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (SAP, 2010: 25). Variabel ini diukur dengan empat indikator yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kuesioner untuk mengukur kualitas pelaporan keuangan dalam penelitian ini berjumlah 7 item pertanyaan dengan menggunakan 7 skala yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Agak Tidak Setuju (ATS), Ragu-Ragu (RR), Agak Setuju (AS) Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia diartikan sebagai kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Yosefrinaldi, 2013:2). Variabel ini diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Kuesioner untuk mengukur kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian ini berjumlah 6 item pertanyaan dengan menggunakan 7 skala yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Agak Tidak Setuju (ATS), Ragu-Ragu (RR), Agak Setuju (AS) Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi diartikan sebagai penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Yosefrinaldi, 2013:10). Variabel ini

diukur dari penggunaan komputer, jaringan, dan *software*. Kuesioner untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini berjumlah 8 item pertanyaan dengan menggunakan 7 skala yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Agak Tidak Setuju (ATS), Ragu-Ragu (RR), Agak Setuju (AS) Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern diartikan sebagai bagian dari sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah negara (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Variabel ini diukur dengan menggunakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Skala pengukuran menggunakan 7 skala yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Agak Tidak Setuju (ATS), Ragu-Ragu (RR), Agak Setuju (AS) Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah 32SKPD di Kabupaten Indragiri Hulu. Data penelitian menggunakan empat variabel, yang terdiri dari 1 variabel dependen yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan dan 3 variabel independen yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern.

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang umum. Tujuan pengujian ini adalah untuk mempermudah pemahaman variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian yang menjadi variabel dependen yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan, sedangkan yang menjadi variabel independen adalah Kapasitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern. Hasil pengolahan SPSS mengenai deskriptif variabel sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Kapasitas SDM	81	29.0370	4.96348
Pemanfaatan tekn	81	41.8395	4.79963
SPI	81	62.9012	9.49685
Kualitas Lapkeu	81	39.9630	4.42844

Sumber: Data olahan, 2017

Analisis Linear Berganda

Tabel 2
Hasil Analisis Linear Berganda

Model	Unstdzd. Coef.		Stdzd. Coef.
	B	Std. Error	
(Constant)	14.798	3.163	
Kapasitas SDM	0.416	0.060	0.163
Pemanfaatan tekn	0.389	0.084	0.421
SPI	0.209	0.043	0.448

Sumber: Data olahan, 2017

Berdasarkan tabel 2, persamaan regresi berganda yang diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 14,798 + 0,146X_1 + 0,389X_2 + 0,209X_3$$

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil Uji Hipotesis

Setelah mendapat model yang baik, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Ketentuan uji t adalah H_0 dapat diterima jika t -hitung lebih kecil atau sama dengan t -tabel dan H_1 diterima apabila t -hitung lebih besar daripada t -tabel. Berdasarkan tabel distribusi t -student dapat dilihat rumus sebagai berikut :

$$= \alpha/2 : n-2$$

$$= 0,05/2 : 81-2$$

$$= 0,025 : 79$$

Dan pada t -tabel hasilnya adalah 1.99. Hasil uji t atas variabel bebas tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji t

Model	T	Sig.
(Constant)	4.678	.000
Kapasitas SDM	2.409	.018
Pemanfaatan tekn	4.605	.000
SPI	4.886	.000

Sumber: Data olahan, 2017

Hasil Uji Hipotesis I

Dari hasil pengolahan data dapat diketahui nilai t -hitung kapasitas SDM (X_1) adalah 2,409 dengan taraf signifikansi sebesar 0,018. Sementara nilai t -tabel adalah 1,99. Dapat diketahui nilai t -hitung (2,409) > t -tabel (1,99). Sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh kapasitas sumber daya

manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan output dan hasil (Zuliarti, 2012). Apabila kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan baik, maka output atau hasil berupa laporan keuangan akan semakin baik.

SKPD Kabupaten Indragiri Hulu telah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang akuntansi. Hal ini terlihat dari kemampuan dan pengalaman pegawai sub bagian keuangan di SKPD Kabupaten Indragiri Hulu serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti yang menjadikan pegawai tersebut sudah memahami tata cara penyusunan laporan keuangan dengan tepat walaupun sebagian besar staf yang bertugas dibidang akuntansi masih berasal dari lulusan perguruan tinggi di luar bidang ilmu akuntansi namun karena tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada staf tersebut, pegawai atau staf berusaha keras untuk belajar dalam membuat laporan yang memenuhi standar akuntansi. Kualitas sumber daya manusia dapat tercermin dari kinerja yang dihasilkan oleh seseorang sebagai ungkapan kemampuan yang

didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan dan motivasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desi Indriasari (2012), Darwanis dan Dewi Dwi Mahyani (2009), Wiwik Andriani (2011), Galuh Fajar Delano dan Deviani (2013), Farida Aryani (2013), Wansyah, dkk. (2012) dan Kesuma, dkk. (2014) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Kemudian, Yosefrinaldi (2013) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Delanno & Deviani (2013), yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain dari penelitian yang mendukung terdapat beberapa hasil penelitian yang tidak mendukung secara signifikan. salah satu hasil penelitian tersebut dipaparkan oleh penelitian Zuliarti (2012) yang mendapatkan hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sama halnya dengan penelitian Sukmaningrum (2012) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Uji Hipotesis II

Dari hasil pengolahan data dapat diketahui nilai thitung pemanfaatan teknologi (X2) adalah 4,605 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Sementara nilai ttabel adalah 1,99. Dapat diketahui nilai thitung (4,605) > t tabel (1,99). Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi (X2) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi diartikan sebagai penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Yosefrinaldi, 2013:10). Variabel ini diukur dari penggunaan komputer, jaringan, dan *software*. Kuesioner untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini berjumlah 8 item pertanyaan.

Pemanfaatan teknologi informasi termasuk teknologi komputer untuk dapat memproses dan menyimpan informasi, juga sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer merupakan alat yang dapat melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Indriasari & Nahartyo, 2008). Meskipun banyak kemudahan yang didapat dari pemanfaatan teknologi informasi, Yosefrinaldi (2013) menyebutkan kelemahan dari teknologi berupa komputer diantaranya, sistem komputer tidak mudah beradaptasi jika terjadi perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi membutuhkan waktu yang lama, serta biaya pemasangan instalasi yang tinggi.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa SKPD Kabupaten Indragiri Hulu telah menggunakan teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi dan juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Aplikasi yang digunakan termuat program-program akuntansi sehingga dalam pembuatan laporan keuangan bisa dilakukan dengan mudah dan nilai-nilai informasi laporan keuangan memenuhi sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu juga menggunakan sistem *online* sehingga penyampaian laporan keuangan yang disajikan lebih andal dan cepat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Desi Indriasari (2012), Darwanis dan Dewi Dwi Mahyani (2009), Wiwik Andriani (2011), Farida Aryani (2013), Wansyah, dkk. (2012), Sukirman, dkk., (2013) dengan hasil, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Kemudian, Yosefrinaldi (2013), bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Delanno & Deviani (2013) juga menunjukkan hasil bahwa, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriana et. al (2015) yang menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Hasil Uji Hipotesis III

Dari hasil pengolahan data dapat diketahui nilai thitung sistem pengendalian intern (X3) adalah 4,886 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Sementara nilai ttabel adalah 1,99. Dapat diketahui nilai thitung (4,886) > t tabel (1,99). Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya terdapat pengaruh sistem pengendalian intern (X3) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Variabel sistem pengendalian intern diartikan sebagai bagian dari sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah negara (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Variabel ini diukur dengan menggunakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2005 antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Untuk itu, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Jika penerapan SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik.

Pengendalian intern menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari ke-andalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Darwanis dan Dewi Dwi Mahyani (2009), Farida Aryani (2013, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan dan bertolak belakang dengan penelitian Desi (2012) dalam hasil penelitiannya Sistem

Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of The Estimate
.806 ^a	.650	.636	2.67008

Sumber: Data olahan, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0,636. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yakni kapasitas SDM (X1), Pemanfaatan Teknologi (X2) dan sistem pengendalian intern (X3) secara bersama-sama memberikan sumbangan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 63,6 %. Artinya variabel kapasitas SDM (X1), Pemanfaatan Teknologi (X2) dan sistem pengendalian intern (X3) mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 63,6 %.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pemanfaatan Teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa mendapatkan data secara keseluruhan dari semua dinas/badan/kantor yang ada, agar hasil yang didapat lebih maksimal.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat melengkapi metode penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan dan melakukan wawancara langsung.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan untuk SKPD Kabupaten Indragiri Hulu dalam proses penyusunan laporan keuangan agar dapat tercapai kualitas laporan keuangan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dengan materi yang mudah dipahami, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui jaringan internet, meningkatkan pemantauan pengendalian intern.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks
- Fuad, Noor. 2004. *Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia di Bidang Keuangan Negara*.

Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Editor: Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath. Jakarta: Buku Kompas

Hidayat, Muhammad. 2011. Peranan Audit Intern sebagai Strategic Business Partner di PT. Pertani (Persero) Wilayah Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal JENIUS*. Vol. 1, No. 1, Halaman 1-21

Hullah dkk., 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*. Vol. 3, No. 2, Halaman 9-21

Lismawati. 2012. Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal JEPP*. Vol. 4, No. 4, Halaman 1-24

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Romney, Marshall B. dan Steinbart, Paul John. 2011. *Sistem*

Informasi Akuntansi, Edisi 9,
Buku 1. Jakarta: Salemba
Empat

Wansyah, dkk., 2012. Pengaruh
Kapasitas Sumber Daya
Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, dan
Kegiatan Pengendalian
terhadap Nilai Informasi
Pelaporan Keuangan SKPD
pada Provinsi Aceh. Jurnal
Akuntansi Pascasarjana
Universitas Syiah Kuala. Vol.
1, No. 1, Halaman 43-58

Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh
Kapasitas Sumber Daya
Manusia dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
dengan Variabel Intervening
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Studi Empiris
pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Se-Sumatera Barat). Jurnal
Akuntansi. Vol. 1, No. 1.
Halaman 1-24